

**Kontinuitas Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kalurahan Dadapayu
Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul****Analius Giawa dan Rukoyah**

Sekolah Tinggi pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Fisip Universitas Patimura Ambon

giawalius@gmail.com dan rukoyah_1985@yahoo.com**Abstrak**

Kebijakan menjadi kunci dalam penyelenggaraan pembangunan dari tingkat pusat, daerah dan desa. Kebijakan sebagai acuan terhadap penyelenggaraan pembangunan. Wilayah pedesaan menjadi prioritas pemerintah dalam mendorong percepatan pengentasan kemiskinan. Hal ini karena basis kemiskinan tertinggi masih terletak di wilayah perdesaan. Data Badan Pusat Statistik Nasional menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan masih 12,5%. Berbagai produk kebijakan dan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan di wilayah perdesaan yang bertujuan untuk menguatkan kapasitas, mendorong kemajuan dan mengentaskan kemiskinan. Tetapi sampai saat ini ada banyak kebijakan yang tidak mampu menjawab isu-isu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu perlu dikaji tentang kontinuitas kebijakan yang selama ini telah ada di Kalurahan Dadapayu, Semanu. Hasil analisis menunjukkan bahwa kendala sumber daya manusia menjadi faktor yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilakukan masih berfokus pada aktifitas tetapi belum melakukan analisis terhadap kegiatan dari hulu sampai hilir. Ini juga disebabkan karena lemahnya evaluasi yang dilakukan terhadap produk-produk kebijakan di Kalurahan Dadapayu.

Kata kunci: *Kontinuitas, Kebijakan, Pemberdayaan, Evaluasi*

Abstract

A policy becomes a key in development management from central, regional and village level. The policy as a reference towards development management. Rural areas have become the government's priority in pushing the acceleration of poverty alleviation. It is because the highest poverty base is still found in rural areas. The Data of National Statistical Central Bureau indicates that the poverty level in rural areas is 12.5%. Various policy products and empowerment activities performed in the area are aimed to strengthen the capacity, push development and alleviate poverty. However, many policies are unable to answer issues which occur in societies. Therefore, the continuity of policy that has existed in Kalurahan Dadapayu Semanu should be reviewed. The analysis result indicates that Human resource obstacle has become an obstacle that influences the process of policy making. Empowerment activities which are still performed focus on the activities themselves but there has not been an analysis towards activity from upstream to downstream. It is also caused by the weak evaluation performed towards the policy products in Kalurahan Dadapayu.

Keywords: *Continuity, Policy, Empowerment, Evaluation*

Pendahuluan

Kata kebijakan selalu berkorelasi dengan pembangunan yang mana kunci dan tujuan terhadap penyelenggaraan pemerintah yang bermuara pada pemberdayaan, keadilan, kemajuan, kemakmuran, dan kemandirian. Penyelenggaraan pembangunan sangat ditentukan oleh produk-produk kebijakan yang ada, baik ditingkat pemerintah pusat, daerah dan desa. Pada pembangunan nasional salah satu wilayah yang selalu menjadi perhatian dalam mendorong percepatan pengentasan kemiskinan adalah wilayah perdesaan. Sebagaimana Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari 2022 yang menyampaikan bahwa data kemiskinan tertinggi di Indonesia masing terletak di wilayah perdesaan dimana tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan sebesar 12,53% dan masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan kemiskinan di wilayah perkotaan yaitu hanya 7,60% (BPS, 2022).

Bercermin dari semangat Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di mana desa saat ini telah mengalami perubahan paradigma yaitu desa tidak lagi sebagai objek pembangunan tetapi menjadi subyek pembangunan itu sendiri. Desa menjadi garda terdepan dalam percepatan pembangunan dan

pengentasan kemiskinan. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menegaskan bahwa negara memberi pengakuan tentang hak-hak desa dan juga terhadap nilai-nilai lokal sehingga desa bisa berkembang dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki. Pemanfaatan sumber daya desa dilakukan secara bersama-sama atas dasar kesepahaman dan musyawarah bersama antara pemerintah desa dan masyarakat. Desa tidak hanya diberikan kewenangan tetapi juga disertai dengan distribusi keuangan dari pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan demikian muncul harapan untuk menuju desa yang maju, mandiri, dan berdaulat dalam segala aspek segera terwujud. Pembangunan di wilayah pedesaan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah desa tetapi menjadi tanggungjawab bersama sebagai prakarsa bersama antara pemerintah desa dan warga masyarakat. Prakarsa serta gagasan dapat terkonsolidasi dalam forum-forum desa seperti musyawarah desa atau forum masyarakat dalam komunitas yang lebih kecil yang dilakukan secara demokratis. Hal ini selaras dengan semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa, maka partisipasi antara pemerintah dan masyarakat desa dalam membangun desanya dapat berkontribusi langsung pada upaya menekan laju kemiskinan di wilayah pedesaan.

Gunungkidul merupakan kabupaten kedua dengan tingkat kemiskinan tertinggi setelah Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yaitu sebesar 17,69% dari total persentase kemiskinan di DIY yaitu sebesar 12,8% (Atmoko & Affandi, 2021). Keadaan ini berbanding terbalik dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah DIY yang merupakan Provinsi terbaik kedua setelah DKI Jakarta. Maka dengan demikian perlu dikaji apa yang menyebabkan keadaan ini terjadi dengan melihat kontinuitas kebijakan yang selama ini telah berjalan di wilayah pedesaan atau kalurahan terkhusus pada pemberdayaan masyarakat.

Kajian ini mencoba mempersempit lokus pada konsistensi penyelenggaraan kebijakan dan proses, interaksi, dan hubungan antara penyelenggara kebijakan dengan masyarakat dalam membangun wilayahnya sendiri. Proses penyelenggaraan pemerintahan desa selalu diwarnai dengan proses interaksi

politik antara pemerintah desa dan warga masyarakat sebagai aktor utama pada saat merumuskan kebijakan. Berbagai kebijakan yang dihasilkan bersumber dari ide dan aspirasi serta kebutuhan masyarakat setempat. Tidak dapat dipungkiri bahwa penyelenggaraan musyawarah di desa seringkali diwarnai kepentingan dan intervensi elit-elit lokal yang menggambarkan dialektika politik di dalam masyarakat pedesaan. Oleh karena itu tulisan ini mencoba lebih fokus pada kontinuitas kebijakan pada bidang pemberdayaan yang menjadi acuan atau arah kerja pemerintah kalurahan (desa) dalam menjalankan program-program pemberdayaan di masyarakat secara khusus di wilayah Kalurahan Dadapayu, Kapanewon Semanu, Gunungkidul.

Kontinuitas adalah prinsip kesinambungan dalam setiap kegiatan kerja yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dari waktu ke waktu. Prinsip kontinuitas juga dikenal dengan istilah prinsip berkesinambungan (Fitrianti, 2018). Evaluasi terhadap kebijakan sangat diperlukan agar mampu mengidentifikasi pencapaian dan kekurangan dari setiap program yang telah dilaksanakan serta sebagai bahan perbaikan untuk kegiatan selanjutnya. Tidak dipungkiri bahwa dalam

menjalankan kebijakan dalam wujud program kerja masih ditemukan kealpaan dari pihak pelaksana dalam melakukan kebijakan itu sendiri secara tepat serta proses evaluasi sebagai bahan perbaikan terhadap kebijakan selanjutnya. Dalam tulisan ini, penulis mencoba memotret isu tentang kontinuitas kebijakan yang dilakukan secara holistik antara proses kebijakan, pemberdayaan, dan evaluasi. Penelitian ini dapat menjadi pijakan dan sekaligus sebagai narasi kritis terhadap proses pengambilan kebijakan selama ini telah berlangsung di wilayah perdesaan atau kalurahan. Pengambil kebijakan perlu melihat kebijakan secara utuh dari hulu ke hilir sehingga tercapai sasaran dan tujuan dari kebijakan itu sendiri sebagaimana yang direncanakan.

Tulisan ini diharapkan mampu mengungkapkan dan mendeskripsikan tentang proses, pelaksanaan, serta menguraikan kendala, hambatan, dan perbaikan ke depan tentang pelaksanaan kebijakan untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Kalurahan Dadapayu. Tidak dipungkiri bahwa Kalurahan Dadapayu termasuk kalurahan penting dan inspiratif di Kabupaten Gunungkidul karena merupakan kalurahan yang mendapatkan julukan Kampung KB serta termasuk dalam

Kalurahan (Desa) dengan luas wilayah terbesar kedua di Kapanewon Semanu yaitu sebesar 21% dari total luas wilayah Kapanewon Semanu (Gunungkidul, 2021).

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif sebagaimana dikemukakan oleh Catherine Marshal dalam (Sarwono, 2006) bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia. Penelitian ini berupaya untuk menguraikan data yang diperoleh dari hasil proses interaksi manusia dalam sebuah pemahaman yang baik dan terstruktur.

Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi-situasi, pandangan-pandangan serta proses-proses yang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena (Nazir, 2017). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik

observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti dalam hal ini bermaksud untuk mendeskripsikan tentang kontinuitas kebijakan Pemerintah Kalurahan Dadapayu terhadap pemberdayaan masyarakat untuk kemajuan Kalurahan Dadapayu.

Lokasi, Obyek dan Subyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah pemerintahan Kalurahan Dadapayu Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul. Dengan objek penelitian yaitu Kontinuitas Kebijakan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kalurahan Dadapayu Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul. Sebagai subyek penelitian ini adalah pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan di wilayah Kalurahan Dadapayu Semanu yaitu Lurah, Perangkat Kalurahan, Dukuh dan Anggota BPD. Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu dengan menggunakan metode purposif yaitu metode dimana penentuan narasumber berdasarkan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini adalah mereka yang menjadi aktor dan terlibat secara langsung terhadap proses pembuatan keputusan di wilayah Kalurahan Dadapayu Semanu.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan dalam Pembangunan Perdesaan

Pemerintah Kalurahan Dadapayu merupakan lembaga pemerintah yang terdepan dan bertugas mengelola sumber daya dan melayani masyarakat setempat. Pemerintah Kalurahan Dadapayu sebagai represtasi negara yang hadir dalam mengayomi dan melayani masyarakat kalurahan. Berbicara tentang kebijakan maka kita sedang melihat negara yang hadir dalam kehidupan warga negara melalui perlindungan, pengayoman, dan pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan. Hal ini sebagai tanggungjawab negara kepada warga masyarakat. Perlu dipahami bahwa organisasi pemerintah terlahir dari masyarakat sehingga pertanggungjawaban dan hasil dari setiap pekerjaan mereka senantiasa bermuara pada kepentingan publik atau masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Hughes dalam (Joko, 2021) bahwa *“government organization are created by the publik, for the public, and need to be accountable to it”*, yang bermakna organisasi pemerintah dibentuk oleh publik dan untuk publik sehingga harus bertanggung jawab kepada publik.

Pendapat di atas dapat dimaknai bahwa organisasi pemerintah memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat sebagai sumber dasar dari keberadaannya. Ini menegaskan bahwa organisasi pemerintah merupakan organisasi yang lahir dari rahim warga masyarakat. Oleh karena itu pemerintahan kalurahan diharapkan mampu memformulasi apa yang menjadi permasalahan masyarakat sehingga dapat dirumuskan dalam bentuk kebijakan. Kartasmita dalam (Joko, 2021) mengartikan kebijakan sebagai upaya untuk memahami dan mengartikan (a) apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah, (b) apa yang menyebabkan atau apa yang mempengaruhinya, dan (c) apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut.

Jika dilihat dari pernyataan di atas maka ini menegaskan bahwa pemerintahan desa secara khusus di Kalurahan Dadapayu harus memiliki kemampuan dalam memahami, melakukan, dan mengidentifikasi keterkaitan antara satu permasalahan dengan permasalahan yang lain serta memahami dampak dari setiap kebijakan yang diambil. Dalam pengamatan

lapangan di Kalurahan Dadapayu bahwa proses yang dilakukan dalam membuat kebijakan memiliki pola yang sama secara umum yaitu dengan berpedoman pada prinsip Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pengambilan keputusan dan lahirnya kebijakan di desa tidak terlepas dari proses musyawarah yang sering disebut dengan musyawarah desa (MUSDesa) atau disebut Musyawarah Kalurahan (MusKal).

Proses dalam pembuatan kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Dadapayu sesuai amanat undang-undang, sebagaimana yang dikatakan oleh Lurah Dadapayu, Bapak Jumadi:

“Bahwa pemerintah Kalurahan Dadapayu secara konsisten melakukan tahap-tahap musyawarah untuk setiap pengambilan kebijakan ataupun keputusan mulai dari tingkat pedukuhan sampai pada tingkat kelurahan. Hal ini sebagai wujud terhadap keterbukaan serta mendorong keterlibatan warga masyarakat Dadapayu dalam melibatkan diri pada

pengambilan keputusan dan kebijakan di Kalurahan” (wawancara, 28 Oktober 2020).

Pernyataan di atas jika dikorelasikan dengan situasi di lapangan memang benar adanya akan tetapi kemampuan dalam memahami dan mengidentifikasi antara situasi masyarakat dengan kebijakan yang akan diambil masih sangat terbatas. Pola pengambilan kebijakan dalam hal pemberdayaan masyarakat Dadapayu masih bersifat populis dan tidak berbasis pada hasil analisis empirik. Dalam pengamatan lapangan elit-elit lokal

masih menjadi aktor-aktor yang nyata dan memiliki intervensi yang besar dalam setiap pengambilan kebijakan. Kebijakan di Kalurahan Dadapayu masih lebih banyak diwarnai pengaruh politik elit sehingga beberapa aspirasi arus bawah tidak dapat terwadahi saat proses musyawarah.

Ada faktor lain yang mempengaruhi suara aspirasi (*voice*) dan akses (*access*) masyarakat termasuk lemah disebabkan karena sumber daya manusia di wilayah kalurahan. Dari 5 Kalurahan di wilayah Kapanewon Semanu, Kalurahan Dadapayu termasuk kalurahan dengan tingkat pendidikan terendah. Hal ini dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 1. Penduduk Menurut Pendidikan Terakhir

Kalurahan	Tidak Sekolah dan Tidak Tamat SD	SD	SLTP	SLTA	D-1 sd D-3	S1	S2 & S3
Pacarejo	5.986	5.935	3.500	1.658	82	129	13
Candirejo	2.427	2.802	1.851	930	64	90	5
Dadapayu	2.317	3.186	1.642	633	33	63	4
Ngeposari	3.197	3.176	2.136	1.605	84	195	14
Semanu	5.222	4.517	3.356	3.221	271	405	28

Data diolah dari tabel data statistik Kecamatan Semanu dalam Angka 2021

Tabel 1 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kalurahan Dadapayu masih tergolong rendah. Ini memiliki keterkaitan terhadap partisipasi dalam proses pengambilan kebijakan di Kalurahan Dadapayu, mulai mengetahui apa yang dilakukan dan keterkaitan kebijakan satu sama lain serta dampak dari kebijakan yang diambil. Sebagaimana dikemukakan oleh T. Imam Prasetyo dalam Adi (2013) bahwa tingkat partisipasi seseorang dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain adalah pendidikan orang yang memiliki pendidikan lebih tinggi akan mempunyai wawasan dan pemahaman yang lebih tinggi pula daripada orang yang memiliki pendidikan lebih rendah. Sehingga partisipasi yang diberikan oleh orang yang berpendidikan lebih tinggi cenderung lebih besar daripada orang yang berpendidikan rendah.

Bagaimana kebijakan dalam kaitannya terhadap hidup masyarakat dapat dilihat pada penelitian yang dituliskan oleh Agus Suryono yang berjudul Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat (Suryono, 2014). Dalam penelitian ini menegaskan bahwa esensi dari kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat, tidak lain tertumpu

pada sila kelima (5) Pancasila sebagai landasan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun keadilan sosial adalah memberikan hak-hak (sosial) kepada mereka yang memang punya hak (baik hak individu maupun hak publik) sesuai dengan asas keseimbangan dan muderasi (proporsional).

Penelitian di atas melihat kebijakan dari perspektif *warfare* dan keadilan, akan tetapi pada tulisan ini melihat kebijakan sebagai sebuah proses interaksi antara penyelenggara pemerintahan dan warga masyarakat yang memiliki keterkaitan pada kapasitas dan kualitas *voice* warga masyarakat dalam keterlibatannya pada proses pembuatan kebijakan. Salah satu indikator yang digunakan dalam tulisan ini adalah sumber daya manusia melalui tingkat pendidikan masyarakat Kalurahan Dadapayu sebagai instrument dalam proses musyawarah.

Tingkat pendidikan yang rendah tidak hanya mempengaruhi partisipasi dalam mengambil bagian pada setiap kegiatan musyawarah di kalurahan tetapi juga berdampak pada kemampuan dan wawasan dalam memahami proses pembuatan produk-produk kebijakan.

Dengan demikian proses pengambilan atau pembuatan kebijakan di Kalurahan Dadapayu masih mengalami kendala dan tidak bisa dilakukan secara optimal dikarenakan oleh keterlibatan politik orang besar (politik elit) yang besar serta tidak memiliki hasil-hasil kajian dalam mengidentifikasi sumber daya dan kebutuhan masyarakat setempat. Sumber daya manusia yang rendah berimplikasi pada rendahnya kualitas kebijakan yang dihasilkan dalam setiap proses musyawarah di kalurahan.

Pemberdayaan di Kalurahan Dadapayu

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan selalu berkaitan dengan program atau kegiatan-kegiatan di mana masyarakat sebagai subyek dari kegiatan tersebut. Pemberdayaan berkaitan erat dengan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development*. Hal ini karena pemberdayaan selalu berkeinginan untuk memberi daya dan menciptakan kemandirian bagi yang diberdayakan. Pemberdayaan itu sendiri menurut Chamber dalam Noor (2011) adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat

peopleentered, participatory, empowerment, and sustainable.

Dalam konsep pemberdayaan lebih menekankan pada manusia sebagai subyek pembangunan bukan sebagai objek pembangunan.

Selama ini Kalurahan Dadapayu telah melakukan berbagai upaya penguatan kapasitas dalam bentuk pemberdayaan kelompok ibu-ibu PKK, ibu-ibu Kader, dan kelompok pengrajin dengan satu harapan bahwa akan terjadi pertumbuhan dan perubahan paradigma masyarakat dalam memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki. Pelatihan yang dilakukan sebagai upaya penguatan kapasitas dalam mendorong kemandirian baik secara individu maupun kelompok. Sebagaimana hasil wawancara dengan Jumadi selaku Lurah Kalurahan Semanu mengemukakan bahwa:

“Kami tidak kurang-kurang melakukan pemberdayaan dari berbagai sektor, mulai dari kelompok ibu-ibu sampai pada menghadirkan para trainer dari dinas terkait maupun dari beberapa Lembaga lainnya dalam memberikan pelatihan kepada kelompok-kelompok yang ada di masyarakat

agar tercipta kemandirian, akan tetapi kegiatan yang dilakukan hanya berjalan sesaat dan setelah itu tidak lagi kedengaran kegiatan tersebut". Memang ada beberapa faktor yaitu ketidak sabaran warga dalam proses, salah satu contoh adalah kelompok warga pengrajin yang mengikut pelatihan pembuatan kerajinan dari bambu. Harapan kami pemerintah kalurahan bisa mendongkrak kemajuan kelompok-kelompok masyarakat sehingga berdampak pada sektor ekonomi warga" (wawancara, 28 Oktober 2020).

Pemerintah Kalurahan Dadapayu selama ini telah mengambil langkah-langkah nyata dalam bentuk program-program pemberdayaan sebagai wujud dalam penguatan kapasitas warga atau kelompok masyarakat melalui pelatihan-pelatihan. Keterlibatan warga atau kelompok masyarakat juga bisa dikatakan baik karena partisipasi yang tinggi dan selalu mengikuti kegiatan-

kegiatan yang diselenggarakan oleh kalurahan atau pihak-pihak lain. Pihak-pihak lain dalam hal ini adalah perguruan tinggi yang selama ini melakukan kegiatan Kerja Kuliah Nyata (KKN) dari berbagai perguruan tinggi seperti STPMD "APMD" Yogyakarta, UNY, dan lain-lain.

Dalam wawancara Lurah Dadapayu muncul sebuah hal yang menjadi kegelisahan dari pemerintah kalurahan sebagaimana dikemukakan berikut:

"Kegiatan-kegiatan selama ini tidak kelihatan dampaknya secara langsung dalam kehidupan masyarakat terutama mereka yang selama ini terlibat dalam pelatihan dan berbagai pendampingan lainnya yang pernah diselenggarakan oleh Kalurahan Dadapayu. Kegiatan-kegiatan ini seperti tidak berbekas" (wawancara, 28 Oktober 2020).

Pernyataan Jumadi di atas juga memiliki korelasi dengan pendapat yang disampaikan oleh Astusi sebagai salah satu Dukuh di Kalurahan Dadapayu. Ia

menyampaikan bahwa:

“Pemberdayaan menjadi satu hal pokok yang selama ini menjadi perhatian pemerintah kalurahan. Hal ini karena potensi besar yang dimiliki oleh Kalurahan Dadapayu baik potensi dalam bentuk benda maupun dalam bentuk sumber daya non benda. Ada satu kejadian dimana pemerintah kalurahan melalui pedukuhan bekerjasama dengan mahasiswa KKN STPMD “APMD” Yogyakarta menggagas untuk melakukan pelatihan kepada ibu-ibu di Pedukuhan Sembuku tentang pemanfaatan sumber daya lokal (singkong/tepung singkong) menjadi produk dengan nilai jual yang tinggi yaitu brownis atau kue kukus berbahan singkong. Namun kegiatan ini hanya menggeliat saat ada mahasiswa dan beberapa bulan setelahnya, tetapi dalam beberapa waktu semuanya akhirnya

berhenti dan tidak lagi dikembangkan” (wawancara, 9 Juni 2021).

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa kegiatan atau program-program selama ini telah dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Dadapayu sebagai upaya untuk mendorong penguatan kapasitas dan wujud pemberdayaan baik secara individu atau kelompok. Usaha-usaha ini terus dilakukan secara berkala dan bahkan setiap tahunnya akan tetapi pola yang dilakukan belum mampu mendongkrak dan berkontribusi terhadap perkembangan dan kemajuan ekonomi masyarakat setempat. Aktivitas dan partisipasi warga hanya bersifat sesaat atau temporer sehingga belum mampu menjadi instrumen penting yang berkontribusi memberi *impect* terhadap perubahan paradigma dan *mind set* terhadap individu atau kelompok. Pola pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Dadapayu belum terbingkai secara terstruktur dan berkelanjutan.

Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan di kalurahan selama ini lebih pada pola rutinitas dan sebatas

pemenuhan pelaksanaan kewajiban sesuai dengan program yang telah direncanakan, akan tetapi harapan akan kemajuan dan perubahan kedepan masih belum terbingkai secara utuh dari hulu ke hilir sebagai satu kesatuan. Rutinitas kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat Kalurahan Dadapayu dianggap baik akan tetapi perlu dilihat pada rangkaian pemberdayaan secara menyeluruh sehingga mampu mencapai pada sasaran yang telah ditetapkan.

Sasaran yang dibuat juga harus rasional dan menjadi sebuah rangkain kontinuitas dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, output dan outcome. Sangat penting pemerintah Kalurahan Dadapayu untuk bekerjasama dengan pihak-pihak ketiga yang memiliki fokus pada pemberdayaan masyarakat berkelanjutan. Program-program yang bersifat rutinitas perlu diminimalisir dan di dorong pada arah kebijakan yang terstruktur dengan manajemen tata kelola yang baik. Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suharyanto & Arif Sofianto yang berjudul “*Model Pembangunan Desa Terpadu Inovatif di Jawa Tengah*” dapat dilihat bahwa dalam proses pembangunan desa harus dilakukan secara terpadu yaitu mulai dari Identifikasi Sumber daya →

Kebijakan → Hasil Pembangunan (Arif Sofianto, 2012).

Penelitian Suharyanto & Arif Sofianto melihat pembangunan dengan tahap-tahap pada sumber daya yang selanjutnya proses kebijakan dan berakhir pada kesejahteraan yang di dalamnya diikuti dengan inovasi dan sinkronisasi, namun pada kasus yang terjadi pada penelitian ini adalah proses kontinuitas dimana penyelenggaraan produk kebijakan dalam hal ini kegiatan pemberdayaan harus terlaksana secara komprehensif di mana kebijakan yang telah diambil diwujudkan dalam pelaksanaan yang selanjutnya dievaluasi dan memiliki *output* dan *outcome* pada kehidupan masyarakat Kalurahan Dadapayu. Pelaksanaan kegiatan yang bermakna pada pemberdayaan masyarakat harus mampu memiliki *impact* nyata terhadap kehidupan masyarakat di Kalurahan Dadapayu. Program pemberdayaan tidak hanya pada kuantitas kebijakan atau program tetapi lebih pada kualitas sehingga memiliki dampak terhadap kemajuan, keberdayaan, dan kemandirian bagi warga masyarakat Kalurahan Dadapayu.

Dari pemaparan di atas maka dapat dipahami bahwa proses penyelenggaraan pemberdayaan di Kalurahan Dadapayu

masih berorientasi pada wujud aktifitas yang sifatnya rutinitas dan belum mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan, kemajuan dan kemandirian masyarakat Kalurahan Dadapayu. Tata kelola dan sudut pandang dalam memaknai pemberdayaan secara holistic masih belum mampu dilaksanakan sebagai instrument dalam mencapai tujuan daripada pemberdayaan yang dilakukan selama ini.

Evaluasi Kebijakan

Dalam konteks ini evaluasi kebijakan lebih difokuskan pada program-program kerja yang dilakukan di wilayah Kalurahan Dadapayu yang merupakan turunan dari kebijakan kalurahan. Evaluasi memiliki posisi strategis dalam mengetahui tentang pencapaian, keberhasilan, tantangan dan ketepatan yang menjadi bahan reflektif untuk merancang capaian pada kegiatan atau program berikutnya. Evaluasi dalam hal ini sebagai perwujudan prinsip kontinuitas.

Pandangan Dunn dalam Handoyo (2012) mengatakan bahwa secara umum, istilah evaluasi dipadankan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian

(*assesment*). Dalam arti spesifik evaluasi berkaitan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Dunn melihat bahwa evaluasi memiliki rangkaian sistematis yang tertintegrasi dari awal sampai akhir pada setiap kegiatan. Dengan demikian evaluasi menjadi langkah strategis dalam memunculkan gagasan-gagasan baru untuk perbaikan atau sebagai bahan untuk lahirnya produk kebijakan baru. Evaluasi memiliki keterkaitan dengan sebuah refleksi dari setiap kegiatan atau kebijakan yang telah diambil. Pandangan Trochim dalam Handoyo (2012) mengatakan bahwa kebijakan memainkan peran penting dalam memberikan umpan balik tentang apa yang terjadi dalam suatu program/praktik/teknologi berkaitan dengan suatu kebijakan.

Dalam observasi lapangan ditemukan bahwa yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan selama ini hanya sebatas pada bentuk pelaporan tahunan serta laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Hal ini dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang laporan pertanggungjawaban tahunan oleh pemerintah desa (kalurahan) melalui musyawarah desa yang melibatkan warga

masyarakat. Aktivitas ini lebih banyak pada tataran administratif dengan spirit akuntabilitas dan transparan akan tetapi tidak pada tataran evaluatif. Laporan yang dihasilkan lebih mencerminkan pada proses kesesuaian antara program kerja yang telah direncanakan (*planned*) dengan penggunaan anggaran yang berimplikasi pada tidak melakukan pelanggaran administratif.

Pandangan Ndraha dalam Dasril (2017) tentang evaluasi adalah evaluasi dapat dimaknai sebagai proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya. Pandangan Ndraha ini menunjukkan bahwa evaluasi merupakan proses untuk melakukan komparasi antara fakta, harapan, dan kenyataan. Hal ini dapat dilihat pada proses pelaksanaan kebijakan di Kalurahan Dadapayu. Secara administratif telah memenuhi kaidah-kaidah penganggaran dan pelaporan tetapi jika dilihat pada hasil (*outcome*) pada tataran kebermanfaatan dan kontribusi dari kebijakan ini terhadap perkembangan masyarakat pada sektor sosial dan ekonomi masih sangat minim. Hal ini tercermin daripada tingkat kehidupan masyarakat desa yang masih belum mengalami kemajuan yang signifikan.

Dalam beberapa kajian sering dipahami bahwa evaluasi kebijakan selalu berfokus pada tataran kegiatan yang dilaksanakan. Seringkali dilihat hanya pada proses kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan, proses pelaksanaan dan kendalanya. Akan tetapi dalam kajian ini penulis mencoba melihat evaluasi kebijakan sebagai proses pencapaian hasil yang optimal pada kesejahteraan warga masyarakat. Hal ini tidak terlepas pada target pencapaian dan subyek dari kebijakan itu sendiri. Kebijakan-kebijakan di pedesaan setiap tahunnya muncul silih berganti, bisa karena hasil dari proses politik antara masyarakat dengan pemerintah desa dan bisa juga sebatas *responsibility* pada suatu keadaan masyarakat setempat. Jika melihat pada proses yang terjadi di Kalurahan Dadapayu dapat ditemukan bahwa kebijakan-kebijakan kalurahan secara khusus pada bidang pemberdayaan dapat ditarik benang merah bahwa masih sebatas pada kebijakan populis. Kebijakan-kebijakan Kalurahan Dadapayu masih terbatas pada kebiasaan umum yang dilakukan oleh pemerintah desa (kalurahan) di berbagai wilayah lainnya, akan tetapi belum mampu melompat melampaui pada penciptaan inovasi-inovasi baru.

Potensi wilayah dan keadaan masyarakat setempat sejatinya bisa menjadi acuan dari pemerintah kalurahan dalam membuat kebijakan yang sifatnya holistik antara potensi yang dimiliki, sumber daya manusia, dan tingkat partisipasi serta kebutuhan warga kalurahan. Selain itu evaluasi yang terstruktur seharusnya dilakukan pada setiap kebijakan sehingga dapat memahami seberapa efisien, efektif, dan dampak pada kehidupan masyarakat Kalurahan Dadapayu. Evaluasi juga dapat dimaknai sebagai upaya pemerintah dalam melihat pencapaian sehingga ada kesinambungan kebijakan yang dihasilkan atau dibuatkan pada setiap periode. Kontinuitas menjadi kata kunci dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan program-program pemberdayaan di masyarakat Kalurahan Dadapayu. Dengan demikian tidak akan muncul kebijakan-kebijakan yang sifatnya populis, atau ikut-ikutan dengan wilayah lain akan tetapi kebijakan yang lahir bersumber dari proses evaluasi yang diselenggarakan secara holistik. Proses musyawarah desa tidak hanya dijadikan ajang laporan administratif tetapi menjadi suatu forum evaluatif terhadap kebijakan-kebijakan yang telah

dihasilkan dan dilaksanakan dalam satu tahun atau satu periode.

Simpulan

Dari hasil pembahasan tentang kebijakan di wilayah Kalurahan Dadapayu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, maka diketahui bahwa produk-produk kebijakan dalam suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh berbagai proses politik dari elit-elit lokal serta pola kebiasaan organisasi pemerintahan dengan produk-produk kebijakan yang sifatnya umum dilakukan tanpa menciptakan gagasan atau inovasi baru. Keterbatasan sumber daya manusia juga mewarnai keterbatasan kualitas produk-produk kebijakan di Kalurahan Dadapayu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul.

Penyelenggaraan program-program pemberdayaan yang merupakan turunan dari produk-produk kebijakan Kalurahan Dadapayu masih dilakukan sebatas rutinistas. Pemberdayaan yang berorientasi pada penguatan kapasitas baik secara individu maupun secara kelompok belum mampu memberikan kontribusi lebih pada kemajuan pola pikir, paradigma, dan juga pada sektor

ekonomi warga masyarakat Kalurahan Dadapayu. Kesenambungan antara satu program dengan program pemberdayaan lainnya belum terbangun secara holistik.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan di Kalurahan Dadapayu Kapanewon masih bersifat laporan administratif dalam bentuk Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dengan uraian antara perencanaan, kesesuaian, dan penggunaan anggaran. Kegiatan ini masih lebih pada kelengkapan administratif regulasi dalam penyelenggaraan pemerintah ditingkat kalurahan (desa). Penyelenggaraan Musyawarah Desa (MUSDesa) pada laporan pertanggungjawaban masih sebatas pada laporan tahunan tetapi belum menjadi ruang evaluatif dalam menilai efektifitas, efisiensi, dan bagaimana kebijakan itu memberi dampak terhadap kehidupan masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok. Kontinuitas antara kebijakan, pemberdayaan, dan evaluasi di Kalurahan Dadapayu, Kapanewon Semanu, Gunungkidul belum menjadi satu kesatuan yang holistik.

Daftar Pustaka

- Adi, K. (2013). *Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi Anggota BPD Dalam Penyusunan Peraturan Desa (Suatu studi kasus di desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember)*. Majalah Ilmiah "DIAN ILMU", 31-42.
- Arif Sofianto, S. (2012). *Model Pembangunan Desa Terpadu Inovatif di Jawa Tengah*. Jurnal Bina Praja; Volume 4 No. 4 Desember 2012, 251-260.
- Atmoko, A. M., & Affandi, A. J. (2021). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gunungkidul 2021*. Wonosari: ©Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul.
- BPS. (2022). *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2021. Persentase Penduduk Miskin September 2021 turun menjadi 9,71 persen*. Diambil kembali dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html>
- BPS, D. (2021). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) D.I. Yogyakarta Tahun 2020*. Yogyakarta, DIY, Indonesia.

- Dasril, M. (2017). *Evaluasi Dampak Implementasi Kebijakan Publik (Studi Tentang Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak)*. Jurnal Dialektika, 67-89.
- Fitrianti, L. (2018). *Prinsip Kontinuitas Dalam Evaluasi Proses Pembelajaran*. Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan, 89-102.
- Gunungkidul, B. K. (2021). *Kecamatan Semanu Dalam Angka 2021*. Wonosari: © BPS Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul. Diambil kembali dari <https://gunungkidulkab.bps.go.id/publication/download.html>
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang dan "Widya Karya" Semarang.
- Joko, W. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Nazir, M. (2017). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Noor, M. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Ilmiah CIVIS, 87-99.
- Rosana, M. (2018). *Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal Ilmu Sosial, 1 Nomor 1, 148-163. Diambil kembali dari <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kelola/article/view/4128>
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suryono, A. (2014). *Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat*. TRANSPARANSI, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 98-102.